

**TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG
SEBAHAGIAN ISINYA MASIH KOSONG DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

TESIS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Strata-2
Magister Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas**



Oleh :

JUNI WANDRI
NPM : 1420 123 077

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. H. Firman Hasan, SH.,LLM
NIP : 19521111979031002

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
NIP. 1970510 200501 1 003

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP PENANDATANGANAN AKTA YANG SEBAHAGIAN ISINYA MASIH KOSONG DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Tesis, S2, oleh : Juni Wandri, NIM. 1420123077

Pembimbing I Prof. H. Firman Hasan, SH, LLM., Pembimbing II Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.

ABSTRAK

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat dan legalitasnya bertugas menjalankan tugas Negara dan produk hukum yang dibuatnya yaitu akta otentik. Kewajiban dan larangannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kondisi seorang Notaris mengirimkan akta yang sebahagian isinya masih Kosong atau sering disebut blangko kosong melalui perantara, anggota notaris dan atau pihak lain dan tidak menandatangani pada saat akta itu dibuat, maka hal tersebut telah memperlihatkan bahwa Notaris tersebut telah melanggar Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Karenanya penelitian ini tentang Tanggungjawab notaris terhadap penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung

Dalam praktek sehari-hari sering dilakukan kewajiban yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena masih lemahnya peraturan yang mengatur sanksi terhadap notaris serta pengawasan yang belum maksimal. Salah satunya adalah tidak dilakukan penandatanganan serta pembacaan akta oleh notaris dan dalam pembuatan suatu akta perjanjian atau perikatan, hanya menyerahkan atau pemberian akta yang sebahagian isinya masih kosong” oleh Notaris, melalui perantaraan pihak lain dan atau anggota/karyawan notaris.

Dalam hal ini pokok permasalahannya yaitu apakah yang melatarbelakangi penandatanganan Akta yang sebahagian isinya masih kosong, Akibat hukum terhadap notaris atas penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung dan Tanggungjawab notaris terhadap penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong yang ditandatangani oleh para pihak.

Metode Penelitian yang dipakai meliputi ; Metode Pendekatan yaitu dengan pendekatan yuridis-empiris, Spesifikasi Penelitian yang bersifat Deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik pengumpulan data melalui study lapangan dan wawancara. Untuk mengolah datanya menggunakan Metode analisis data atau menggunakan metode analisis kualitatif.

Kesimpulannya adalah tanggungjawab notaris terhadap penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong, dilatarbelakangi oleh keberadaan notaris yang jauh dari wilayah jabatannya, Ketersediaan waktu notaris yang tidak cukup dan dikarenakan hubungan emosional dan hubungan kerjasama notaris dengan pihak yang telah lama terbangun. dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan atas akta, maka terlihat bahwa akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti dibawah tangan dan tanggungjawab notaris dilakukan secara utuh mulai aspek pertanggungjawaban secara Undang-undang Jabatan Notaris, Pertanggungjawaban secara Kode Etik Notaris dan Pertanggungjawaban secara perdata atas kebenaran materill akta.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Notaris dan Penandatanganan akta.

THE RESPONSIBILITY OF NOTARY IN SIGNING PARTLY EMPTY DEED IN KABUPATEN SIJUNJUNG

Master Thesis, by : Juni Wandri, NIM. 1420123077

Supervisor I Prof. H. Firman Hasan, SH, LL.M., Supervisor II Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.

Abstract

Notary is certain position which the profession is to provide legal service to the community and the legality is in charge of running the duty of the State and the laws are made namely authentic deed. Obligations and prohibitions stipulated in the law of notary. Under condition of a notary sends partly empty deed or blank form through intermediaries, other parties or members of the notary and do not sign at the time the deed is made, the notary can be said violated the Law of Notary and ethical code of Notary. Therefore, this research is focused on the responsibility of notary against the signature of partly empty deed in Kabupaten Sijunjung.

Such kind of activity is often done in daily practice and this is contrasts to the laws that govern them. It happened since the weakness of sanction's regulation and lack of control. One of them is the notary does not sign and read the deed and just hand or giving an those deed which some part of it still empty when making a deed of covenant or agreement through the intermediary of other parties or members / employees of the notary.

The main problem in this case are : what are the reasons of signing the deed which some part of it still empty, the legal consequences for the notary when signing the deed which some part of it still empty in Kabupaten Sijunjung; and the notary responsibility towards signing the partly empty deed which is signed by the parties.

The research method applied is: approaching method namely juridical empirical approach, the research's specification is descriptive analytical, the data used are primary data which is taken directly in the field and secondary data which are use to complete the primary data. The data is collected through field studies and interviews and the method of analyzing data is qualitative analysis method.

The result of the research shows that the signing of partly empty deed by notary is caesed by the presence of a notary away from their office area, the notary has less time availability and the emotional relationship and cooperative relationship between notary and other party that has already established. Judging from the legal consequences arising on the deed, it is seen that the power of the deed is only as a week evidence and notary take full responsibility starting from aspect of accountability in legislation, responsibility in ethic code and responsibility in civilly for the correctness of deed material.

Keywords : Responsible, Notary, data signing